



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.1, Juni 2016

KOMUNITAS ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

- **Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives**
- **Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia**
- **Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003**
- **Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat**

RESUME PENELITIAN

- **Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru**
- **Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara**
- **Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN**

REVIEW BUKU

- **Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan**

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 1	Hlm. 1-143	Jakarta, Juni 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Dede Mariana (*Ahli Kajian Politik Lokal dan Pemerintahan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Dr. Nurliah Nurdin (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Kurniawati Hastuti Dewi, Ph.D (*Ahli Kajian Politik Lokal, Gender dan Politik*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Hayati Nufus, S.Hum
Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii-v
Artikel	
• Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity melalui ASEAN Regional Forum on Cybersecurity Initiatives <i>David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari</i>	1-20
• Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan Bagi Gerakan Buruh di Indonesia <i>Fathimah Fildzah Izzati</i>	21-32
• Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003 <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	33-52
• Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat <i>Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	53-68
Resume Penelitian	
• Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru <i>Diandra Megaputri Mengko, dkk</i>	69-82
• Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara <i>Awani Irewati, dkk</i>	83-104
• Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Khanisa, dkk</i>	105-118
Review Buku	
• Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan <i>Nanto Sriyanto</i>	119-136
Tentang Penulis	137-138
Pedoman Penulisan	141-145

CATATAN REDAKSI

Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan ASEAN, karenan di permulaan tahun ini Komunitas ASEAN resmi dijalankan. Pembentukan komunitas ini disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita integrasi di antara mereka. Integrasi di kawasan ini juga diharapkan dapat membuka pintu yang lebih lebar bagi peluang kerja sama di tingkat ASEAN, sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan ini. Selain peningkatan kesejahteraan di kawasan, hal lain yang juga ingin dicapai oleh ASEAN adalah membangun komunitas yang menguatkan solidaritas di antara anggotanya dan lebih bersifat people-oriented. Di tengah dinamika politik dan ekonomi di tingkat internasional yang semakin kompleks, Komunitas ASEAN diharapkan mampu mendorong sepuluh anggotanya untuk meningkatkan daya saing mereka miliki, sehingga ASEAN siap menghadapi tantangan regional dan internasional yang ada. Dalam membangun komunitas yang dicita-citakan, dibentuklah tiga pilar utama, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN diharapkan mampu menjaga ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Hal ini diperlukan agar ASEAN dapat membangun lingkungan politik yang harmonis yang mampu menghadapi ancaman-ancaman dari luar ataupun potensi konflik di dalam tubuh ASEAN sendiri. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ASEAN membangun Komunitas Ekonomi ASEAN dengan tujuan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dan perdagangan antarnegara anggota ASEAN yang mampu bersaing secara sehat. Peningkatan daya saing produk-produk dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan agar ASEAN dapat mengambil peluang yang besar

dari perdagangan bebas di dunia internasional. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat memperkecil gap perkembangan ekonomi di antara negara anggota ASEAN dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota ASEAN. Selain peningkatan kesejahteraan ekonomi, ASEAN juga mengharapkan terbentuknya masyarakat yang memiliki solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat terhadap ASEAN. Untuk itulah dibentuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kedekatan geografis diharapkan tidak hanya mampu menjalin keterhubungan secara fisik di ASEAN, namun juga mampu menjalin keterhubungan di antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN pada dasarnya akan membawa peluang yang sangat besar bagi ASEAN. Akan tetapi, pemberlakuan Komunitas ASEAN juga harus menghadapi beberapa tantangan yang muncul baik dari dalam tubuh ASEAN ataupun dari luar. Perbedaan tingkat kemajuan di antara negara anggota merupakan tantangan internal yang harus dihadapi ASEAN. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dapat menjadi ganjalan integrasi yang ingin dicapai oleh ASEAN, terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, perbedaan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi Komunitas ASEAN juga menjadi tantangan bagi ASEAN. Sementara tantangan dari luar misalnya adalah tantangan yang muncul dari konstelasi politik internasional yang masih didominasi oleh kekuatan-keuatan negara besar, seperti Amerika dan Tiongkok. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dan Tiongkok apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi ganjalan bagi kestabilan di kawasan ini.

Bagi Indonesia, Komunitas ASEAN juga membuka peluang yang besar, terutama dalam mendorong peningkatan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dilihat dari kesiapannya, peluang yang ada tidak dapat diambil secara optimal oleh Indonesia apabila pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pembangunan infrastruktur, kerangka hukum, serta kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi Indonesia dalam Komunitas ASEAN dirasa masih kurang. Dari segi sosial masyarakat, Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan Komunitas ASEAN masih rendah. Belum banyak masyarakat yang menyadari arti penting Komunitas ASEAN atau ASEAN sendiri bagi Indonesia. Melihat kenyataan ini, *Jurnal Penelitian Politik* kali ini mengangkat tema “Komunitas ASEAN dan Tantangan ke Depan” untuk melihat lebih lanjut sejauh mana implementasi Komunitas ASEAN akan membawa dampak bagi ASEAN ataupun Indonesia, dan tantangan apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang. *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini menyajikan lima artikel, dan tiga resume hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI.

Artikel pertama berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cyber Security Melalui ASEAN Regional Forum on Cyber Security Initiatives”** yang ditulis oleh David Putra Setyawan dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari mencoba membahas tentang upaya Indonesia dalam memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF) on cyber security initiatives untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Kemajuan teknologi, terutama di bidang cyber telah membuat batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini memicu munculnya kejahatan dan ancaman nirmiliter di bidang teknologi bagi sebuah negara dalam bentuk ancaman cyber. Untuk menghadapi hal tersebut Indonesia memerlukan strategi untuk melindungi keamanannya. ARF menjadi salah satu forum yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengajak negara-negara ASEAN dan negara mitranya untuk bekerja sama dalam

meningkatkan pertahanan dan menjaga stabilitas di kawasan.

Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kita berbicara tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati yang berjudul **“Membaca ‘PHK Massal’: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia”** mencoba melihat dampak pemberlakuan MEA bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong MEA sempat menimbulkan isu “PHK Massal”. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi MEA, terutama dalam bidang industri elektronik.

Artikel berjudul **“Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN pasca-2003”** ditulis oleh Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Artikel ini menjelaskan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam dua sektor regionalisasi ASEAN, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi partisipasi ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya.

Dengan adanya integrasi di kawasan ASEAN melalui implementasi Komunitas ASEAN, masyarakat yang paling merasakan dampak langsung keterhubungan dan menipisnya batas antarnegara melalui integrasi tersebut adalah masyarakat di perbatasan. Artikel berjudul **“Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat”** mencoba mengulas tentang sejauh mana kesiapan yang dimiliki oleh warga di wilayah perbatasan Indonesia dalam menyongsong

pemberlakuan Komunitas Ekonomi ASEAN. Artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo ini melihat ketahanan yang dimiliki masyarakat di Entikong melalui enam modal: modal alam, modal sosial, modal keuangan, modal politik/pemerintahan, modal fisik, dan modal manusia. Dari hasil analisis ini direkomendasikan bahwa pemerintah perlu melakukan reoptimalisasi kerja sama lintas perbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan perlu membuat aturankhusus untuk perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Selain lima artikel di atas, *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini juga menampilkan tiga resume penelitian yang telah dilakukan oleh tim-tim penelitian di Pusat Penelitian Politik. Resume penelitian pertama adalah mengenai perkembangan intelegen di Indonesia. Dalam ringkasan penelitian yang berjudul **“Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”** yang disusun oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Diandra Mengko Megaputri dibahas mengenai perkembangan dinamika intelegen Indonesia terutama pada masa setelah orde baru. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang teori intelegen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia.

Tim Penelitian yang ada di Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang terkait dengan Komunitas ASEAN. Salah satunya adalah resume penelitian berjudul **“Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara”** yang disusun oleh Awani Irewati, dkk. Pada penelitian ini Tim Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan penelitian tentang upaya pembangunan keterhubungan melalui kerja sama lintas perbatasan di sub-kawasan Sungai Mekong antara Tiongkok dengan lima negara ASEAN: Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dalam kerja sama sub-kawasan ini, Tiongkok sebagai negara non-ASEAN menjadi salah satu penggerak aktif kerja sama *Greater Mekong Subregion*. Keterhubungan yang dilihat bukan hanya keterhubungan fisik saja, melainkan juga keterhubungan institusi dan keterhubungan masyarakat. Kerja sama sub-kawasan di ASEAN

sangat penting, terutama untuk mempersempit adanya gap perkembangan antara ASEAN bagian utara dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai peran kerja sama sub-kawasan di ASEAN dalam membangun keterhubungan yang akan mendorong kesuksesan implementasi Komunitas ASEAN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa salah satu tantangan bagi Indonesia dalam melaksanakan Komunitas ASEAN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Komunitas ASEAN. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik pada tahun 2015. Dalam ringkasan penelitian terakhir berjudul **“Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN”** yang disusun oleh Khanisa, dkk dijelaskan bahwa kesadaran dan pemahamann publik menjadi faktor kunci yang menentukan apakah pilar-pilar yang telah disusun untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk Kementerian terkait. Strategi yang disarankan salah satunya adalah menekankan sebuah upaya berkelanjutan dan memiliki sasaran yang lebih nyata dalam melaksanakan program-program sosialisasi mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN kepada masyarakat.

Catatan redaksi kali ini kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi sehingga *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat terbit. Terima kasih kami ucapkan untuk penulis, mitra bestari, serta tim pengelola jurnal. Semoga *Jurnal Penelitian Politik* ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan dan praktis terkait dengan kajian mengenai ASEAN dan Komunitas ASEAN, serta dampaknya bagi Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**DIPLOMASI PERTAHANAN
INDONESIA DALAM PENCAPAIAN
CYBERSECURITY MELALUI
ASEAN REGIONAL FORUM ON
CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 1-20

Perkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui

wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.

Kata Kunci: ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**MEMBACA “PHK MASSAL”:
RANTAI NILAI INDUSTRI
ELEKTRONIK, MEA, DAN TANTANGAN
BAGI GERAKAN BURUH DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 21-32

“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut keterlibatan Indonesia dalam MEA. Adanya konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun lebih terkait erat dengan politik produksi dalam industri elektronik. Pada sisi lain, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas, termasuk dalam konteks MEA. Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki

peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memosisikan dirinya di dalam rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.

Kata Kunci: PHK Massal, Rantai Nilai Industri Elektronik, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*: MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES REGIONALISME ASEAN PASCA-2003

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 33-52

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan ‘pemangku kepentingan’/ stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi

kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

KETAHANAN SOSIAL WARGA PERBATASAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 53-68

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi MEA yang inklusif pada tahun 2025. Sebagai penduduk kawasan perbatasan yang pintu gerbang lintas batas Indonesia-Malaysia, masyarakat Entikong harus memiliki ketahanan sosial yang kuat untuk menghadapi semakin bebasnya pergerakan orang dan barang di wilayah mereka. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi MEA tersebut. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, ketahanan sosial masyarakat Entikong juga dibantu dengan pelaksanaan kerja sama lintas Indonesia-Malaysia. Tulisan ini menyarankan reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA.

Kata Kunci: Entikong, ketahanan sosial, kerja sama lintas batas, Masyarakat Ekonomi ASEAN

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

**INTELIJEN DALAM PUSARAN
DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA
ORDE BARU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 69-82

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

DDC: 352.14

Awani Irewati

**PROBLEMATIKA KERJA SAMA
PERBATASAN SEPANJANG SUNGAI
MEKONG ANTARA TIONGKOK DAN
ASEAN BAGIAN UTARA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 83-104

Selama berabad-abad, sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan orang enam negara riparian ini. Secara geografis, mengalir melalui negara-negara tersebut untuk sekitar 4.900 km. Ini menciptakan sebuah DAS 795.000 km², didistribusikan antara Upper Mekong River Basin yang terbentuk oleh China (21 persen) dan Myanmar (3 persen), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25 persen), Thailand (23 persen), Kamboja (20 persen), dan Viet Nam (8 persen) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang mereka sendiri di atas Sungai Mekong dan sub regional yang, negara-negara riparian telah mengembangkan beberapa inisiatif kerjasama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Komisi [MRC] dll adalah contoh dari kerjasama lintas batas. Selain itu, ada beberapa kerjasama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari sub regional Mekong tetapi tidak secara khusus fokus pada Mekong River, yaitu ASEAN-China Free Trade Area dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerjasama di sub regional Mekong. Analisis tulisan ini beberapa potensi/masalah yang ada yaitu kemungkinan bahwa mereka kerjasama tumpang tindih; perbedaan profil negara-negara ‘tampaknya membuat kepentingan yang berbeda di antara mereka dll Analisis tersebut didasarkan pada beberapa penelitian lapangan di beberapa tempat (Vietnam, Laos, Thailand) pada tahun 2015.

Kata kunci: kerjasama lintas batas, negara-negara ASEAN Utara, RUPS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas.

DDC: 352.14

Khanisa

**STRATEGI PENINGKATAN
PEMAHAMAN MASYARAKAT
TENTANG MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 105-118

ASEAN tengah merubah pendekatan institusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap

lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai di terapkan tahun lalu.

Kata Kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, Juni 2016, Hal. 119-136

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas

posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

Kata Kunci: Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

DDC: 324.2598

**David Putra Setyawan, Arwin Datumaya
Wahyudi Sumari**

**INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY
IN ACHIEVING CYBERSECURITY
THROUGH ASEAN REGIONAL FORUM
ON CYBERSECURITY INITIATIVES**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 1-20

The development of information technology in the international world impacts to the use of cyberspace which covers all aspects of national life. Faced to this condition, Indonesian government needs to understand the state of cyber security and build it so that able to address any kind of threat which comes through cyberspace. In addition to internal conditions, the scope of the external noteworthy to be considered due the nature of cyber threats are transnational, cross the line of sovereignty, and has been seen as a common threat by the countries of the world. ASEAN has become a forum for Indonesia's to achieve national interests in order to support national security in the cyber field. Through the ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, defense diplomacy strategy directed to increasing mutual trust (confidence building measures) between states and reduce any potential threats that may result from the external sphere. Those efforts, resulted in an agreement in the form of point of contacts between states and a shared vision for continuous training of cybersecurity in the form of seminars and workshops to build the capacity of human resources. Strategies and efforts are analyzed through a qualitative approach and primary data were collected through interviews with 15 informants from various government

agencies. In addition, literature, journals, and related documents are also used as supporting data.

Key Words: ARF, confidence building measures, cybersecurity, defense diplomacy

DDC: 324.2598

Fathimah Fildzah Izzati

**THE "MASS LAYOFFS":
ELECTRONICS INDUSTRY VALUE
CHAIN, AEC, AND CHALLENGES FOR
LABOUR MOVEMENT IN INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 21-32

"Mass layoffs" issue has been rising in labour's political discourse in Indonesia since early 2016, following the announcement of economic policy package to face the Asean Economic Community (AEC). However, the word "mass" constructed in the issue goes against the employment data and is more closely related to political interests related to production in the electronics industry. On the other hand, labour movement issue in the electronics sector is also emerging along with the increase of labour market flexibility in this free market era, including the context of AEC. This study discusses the relationship between the mass layoffs issue, the implementation of AEC, and the labour movement in Indonesia, as well as the value chain of the electronics industry on the global level. It aims to show the role of labour movement in facing an economic scheme like AEC especially in electronics industry using value chain theory analysis. By using qualitative approach and literature review, the study found

that the labour movement in Indonesia has an excellent opportunity to build strength at the regional level by positioning themselves in the global value chain and flexible labour market regime.

Keywords: Mass layoffs, Value Chain, Electronics Industry, Labor Market Flexibility, AEC, Labour Movement.

DDC: 320.014

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

**SPACE TRANSFORMATION AND
STAKEHOLDERS PARTICIPATION:
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS
OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS AND SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN POST-2003
REGIONALISM IN ASEAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 33-52

This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human

Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.

Keywords: regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

DDC: 320.014

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**THE SOCIAL RESILIENCE OF
INDONESIAN BORDER AREA
RESIDENTS TOWARDS THE ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY:
A STUDY IN ENTIKONG SUBDISTRICT,
WEST KALIMANTAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 53-68

ASEAN Economic Community (AEC) was formally come into force at the end of 2015, and will be further transformed to be more inclusive by 2025. To deal with this issue, the residents of Entikong subdistrict at the Indonesia-Malaysia borderland should have a strong social resilience. This article explain the author's work on the social resilience assessment of the Entikong residents towards the AEC implementation. By using a modified Sustainable Livelihood Approach, the result shows that Entikong residents have four adequate social resilience assets, namely natural capital, social capital, financial capital, and political capital. Unfortunately, they are still weak on physical and human capitals. This work also shows that cross-border cooperation implementation gives positive effects to the residents. For recommendation, cross-border cooperation should be re-optimized and a special treatment of border trade in AEC should be arranged.

Keywords: Entikong, Social Resilience, Cross-border Cooperation, ASEAN Economic Community.

DDC: 320.014

Ikrar Nusa Bhakti, Diandra Mengko

***INTELLIGENCE AND
DEMOCRATIZATION IN INDONESIA
POST NEW-ORDER***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 69-82

Intelligence is an important and also complicated topic to study and understand because of its nature of secrecy. However, democracy always pushes the people to have at least basic comprehension of all government agencies, including the world of intelligence. Along with that spirit, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) was conducting research entitled "Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order" in 2015. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of intelligence in Indonesia. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. Oversight mechanism would not weaken intelligence role -in contrast, it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget.

Keywords: *Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order*

DDC: 352.14

Awani Irewati

***PROBLEMATIC BORDER COOPERATION
ALONG THE MEKONG RIVER BETWEEN
CHINA AND ASEAN NORTHERN***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 83-104

For centuries, the Mekong river has become the center of six riparian countries's people life. Geographically, it flows through these countries for about 4,900 km. It created a 795,000 km² river basin, distributed between the Upper Mekong River Basin that is formed by China (21 percent) and Myanmar (3 percent), as well as the Lower Mekong River Basin, which comprised Laos (25 percent), Thailand (23 percent), Cambodia (20 percent), and Viet Nam (8 percent) (FAO, 2011). To fulfill their own people's needs over the Mekong River and its subregion, those riparian states have been developing some transboundary cooperation initiatives among them. Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong Ricer Commission [MRC] etc. are examples of the transboundary cooperation. Besides, there are some other cooperations that cover the whole or part of the Mekong subregion but do not specifically focus on Mekong River; i.e. ASEAN-China Free Trade Area and ASEAN Community. This condition creates a complexity of relationships among the cooperations in the Mekong subregion. This paper analysis some potential/existing problems i.e. a possibility that those cooperations overlap; the differences in the countries' profile seem to create different interests among them etc. The analysis is based on some field research in some places [Vietnam, Laos, Thailand] in 2015.

Keywords: *transboundary cooperation, Northern ASEAN countries, GMS, MRC, Mekong River, connectivity.*

DDC: 352.14

Khanisa

***STRATEGY TO INCREASE PUBLIC
UNDERSTANDINGS ABOUT ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY***

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 105-118

ASEAN is gradually changing their approach from top-to-bottom to a more grassroots style institution. The idea of creating a community push ASEAN to be more inclusive in implementing its programmes. In realizing ASEAN Economic Community, public awareness and undertsndings is the key factor in whether the implementation of this ASEAN's pillar will succeed. Recalling that the popularity of

ASEAN and its frameworks are not significantly known in Indonesia, the survey and the policy paper that followed aim to find out the level of public understandings about ASEAN Economic Community which started to be implemented last year.

Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, Indonesia, public survey.

DDC: 320.014

Nanto Sriyanto

**NEOTRADISIONALISME DAN
DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 1, June 2013, Page 119-136

*This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), and *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision*

maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.

Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist

REVIEW BUKU
NEOTRADISIONALISME DAN DISTOPIANISME: TINJAUAN ATAS
TIGA BUKU ROBERT D. KAPLAN

BOOK REVIEW
NEOTRADISIONALISME DAN DISTOPIANISME: REVIEW FOR THREE
BOOKS OF ROBERT D. KAPLAN

Nanto Sriyanto

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta
e-mail: nantosriyanto@gmail.com

Judul Buku : 1. *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War*
2. *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate*
3. *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific*
Pengarang : Robert D. Kaplan
Tahun Terbit : 2000, 2013, 2014

Diterima: 22 Mei 2016; direvisi: 10 Juni 2016; disetujui: 28 Juli 2016

Abstract

This article is to analyze three publications of Robert D. Kaplan, which consist of The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War (New York: Vintage Books. 2000), The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random House Publishing. 2013), and Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific (New York: Random House. 2014). In those three publications, Kaplan utilizes geopolitical approach and embedded journalism in examining turbulent world in post-Cold War era. His arguments contain in the three books could be summarized as follows: failed states has threatened the stability the world, especially the prosperous developed countries (2000), resurgent of classical geopolitical thinking on tackling shrinking space yet polarized world politics (2013), implication on East Asia region as the volatile zone prone to conflict in the future. Based on the three publications, it could be seen that Kaplan is a proponent of neotraditional realism in IR studies, and it brings about dystopian thesis in those publications. Nevertheless it is discernible to note that despite his prosaic nature in almost of his writings that has attracted wider readership spread from academics, NGO's activists, and decision maker, Kaplan has not given enough space to discuss his theoretical position before he comes up with single theoretical perspective. Therefore, instead of giving a holistic picture about his subject in those three publications, his arguments and thesis which he claims based on embedded journalism and field observation should be criticised due to imbalance description and short-sighted conclusion.

Keywords: Robert D. Kaplan, geopolitic, neotradisionalism realist, holistic, travel journalist

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House Publishing. 2013), dan *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang populer dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalist menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap.

Kata Kunci: Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisionalisme, holistik, travel journalist

Pendahuluan

Robert D. Kaplan memulai karir sebagai wartawan dengan sejumlah tulisan yang menunjukkan kemampuan visioner melalui detil pengamatan lapangan. Tulisannya banyak dimuat di majalah *the Atlantic Monthly* selain juga muncul di sejumlah media seperti *Foreign Policy*, dan *the Wall Street Journal*. Tulisannya telah banyak mengundang diskusi dan polemik. Beberapa tulisannya menyiratkan kemampuan visioner terutama pada paruh waktu pasca-Perang Dingin, saat sebagian besar penulis dan pengamat politik internasional berharap perkembangan positif politik dunia lepas dari persaingan negara adikuasa. Sudut pandang Robert D. Kaplan mengungkapkan sisi lain dunia internasional yang belum lepas dari potensi ancaman yang muncul dalam bentuk baru. Berdasarkan amatan dan analisisnya tersebut, Thomas Friedman, seorang columnist harian New York Times, menyebut Kaplan sebagai salah satu dari empat orang yang paling banyak dibaca dan dirujuk secara luas dalam politik internasional pasca-Perang Dingin. Bersama Kaplan, Friedman menempatkan Francis Fukuyama dari Stanford University, Paul Kennedy dari Yale University dan Samuel Hantington dari Harvard University.¹

Latar belakang Kaplan yang seorang wartawan sebelum mapan sebagai akademisi di sejumlah lembaga kajian di Amerika Serikat cukup memberikan nuansa tersendiri dalam tulisan-tulisannya. Kaplan memulai karir sejak tahun 1981-1984 dengan menjadi koresponden dan memasok tulisan untuk *The Globe and Mail* yang berbasis di Toronto Kanada, dan *Atlanta Journal-Constitution* saat ia berdiam di Yunani. Hingga tahun 1984, dua tulisan pertamanya dipublikasi di *the New Republic* tentang kerusuhan social di Tunisia (26 Maret 1984) dan pemerintahan tirani Saddam Husein di Irak (9 April 1984). Lalu pada April 1986, tulisan pertamanya mengenai kekeringan dan kericuhan sosial di Sudan bagian barat termasuk Darfur dipublikasikan *the Atlantic Monthly*. Tulisan itu menandai mulanya hampir delapan puluh laporan dan essay mengenai politik luar negeri yang terbit di majalah bulanan tersebut.²

Dalam laporan dan gaya reportasenya, Kaplan menempatkan budaya anti-mainstream dalam peliputannya. Ia menghindari perhatian yang sama dari kebanyakan media dan lebih memperhatikan tempat-tempat yang luput dari perhatian.³ Penghindaran atas *herd instinct* ini yang membuatnya lebih memilih Eropa Timur saat kawasan itu belum menjadi topik perhatian

¹ http://www.robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_bio.htm. Diakses pada 23 Mei 2016

² *Ibid*

³ *t Ibid*

media utama dunia di tahun 1980an. Pada masa-masa tersebut, perhatian media dunia masih terutama diberikan pada persoalan di Nikaragua, El Salvador dan Lebanon. Di saat yang sama ia juga memberikan perhatian pada pendudukan Uni Soviet di Afganistan, yang menurutnya lebih banyak menimbulkan korban muslim dibandingkan konflik di Lebanon. Termasuk perhatiannya pada kawasan Tanduk Afrika terkait dengan kelaparan dan konflik social di Ethiopia. Di kawasan terakhir ini ia memunculkan pandangan yang melihat persoalan kelaparan dan konflik bukan semata persoalan lingkungan namun dipengaruhi dan diakibatkan oleh kebijakan rezim stalinis yang berkuasa di Ethiopia pada masa itu.⁴

Dengan pandangan yang berangkat dari amatan lapangan tersebut, tak jarang Kaplan memunculkan pandangan yang berbeda. Termasuk pandangannya tentang masa depan dunia di periode awal keruntuhan rezim komunis dan berkembangnya demokrasi di berbagai belahan dunia. Pandangannya tentang perkembangan demokrasi tidak serta merta diikuti perbaikan kondisi dunia melainkan adanya potensi instabilitas, serta potensi kebangkitan ethno-nasionalisme yang lahir dari pengamatan mendalamnya di kawasan Afrika, Syria dan Balkan.⁵ Hal ini berbeda dari pandangan kebanyakan demokratisasi yang datang dari sarjana hubungan internasional yang melihat demokrasi dan liberalisasi berjalan berdampingan, seperti yang dikemukakan dalam pandangan *Democratic Peace Theory* dan *Structural Adjustment Program*.⁶ Keraguan yang

⁴ Robert D. Kaplan, "Preface" dalam *The Coming Anarchy*. (New York: Vintage Book, 2000), hlm. xii.

⁵ Robert D. Kaplan, "Sudan: A Microcosm of Africa's Ills" (April 1986) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1986/04/sudan-a-microcosm-of-africas-ills/304699/>, diakses dari Syria: Identity Crisis (Februari 1993), <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1993/02/syria-identity-crisis/303860/>, *The Balkans: Europe's Third World* (Juli 1989) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/flashbks/balkans/kaplanf.htm>

⁶ Untuk perdebatan mengenai transisi demokrasi yang melihat aspek ekonomi politik, khususnya perkembangan structural adjustment program yang digagas lembaga keuangan dunia dikupas dalam buku Lisa Anderson (ed.), *Transition to Democracy*, (New York: Columbia University Press. 1999).

dikemukakan Kaplan dalam "Was Democracy Just a Moment?"⁷

Kumpulan tulisan Robert D. Kaplan tersebut dibukukan dalam buku *The Coming Anarchy* (2000) yang menggambarkan pemikiran awalnya perihal perkembangan dunia di dekade pertama pasca-Perang Dingin. Memasuki dekade kedua millennium baru, Robert D. Kaplan menerbitkan dua buku yang kurang lebih bertalian secara tematik. Buku pertamanya yang dimaksud adalah *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (2013) yang secara tematik juga dapat dipertautkan dengan buku yang terbit belakangan mengenai perkembangan Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara pesisirnya, *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (2014). Kedua buku ini menarik disandingkan dengan buku pertama dalam melihat perkembangan pemikiran Kaplan dengan pendekatannya yang lekat dengan amatan lapangan. Pada buku kedua terakhir, Kaplan menawarkan perspektifnya yang terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap dinamikan hubungan antar negara. Dengan narasi sejarah dan pemikiran geopolitik klasik yang perkembangannya tidak lepas terhadap keputusan strategis negara-negara besar di dunia, Kaplan menawarkan posisi krusial geopolitik dalam dinamika hubungan antar negara terkini.

Berdasarkan ketiga buku ini, pemikiran Kaplan nampaknya sedikit banyak dapat diungkapkan. Melihat bagaimana ia berupaya lepas dari pandangan umum (*herd instinct*) serta perspektifnya yang kuat akan pengaruh geopolitik, dapat dikatakan ketiga buku ini layak diulas secara bersamaan. Buku pertama *The Coming Anarchy* (2000) dapat menjadi pijakan rangkaian pemikiran Kaplan, sementara buku kedua *The Revenge of Geography* (2013) merupakan pandangan teoritis terkait dengan posisia geopolitik negara-negara yang berpotensi mempengaruhi politik global, serta

⁷ Robert D. Kaplan, "Was Democracy just A Moment?" (Desember 1997) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/12/was-democracy-just-a-moment/306022/>. Tulisan ini juga menjadi satu bab dari buku Robert D. Kaplan, "Was Democracy just A Moment?" dalam Robert D. Kaplan, *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage Books. 2000), hlm. 59-98

buku ketiga *Asia's Cauldron* (2014) merupakan gambaran terdekat geopolitik dan sejarah serta kebudayaan bermain dalam lingkup kawasan yang lebih kecil.

Kaplan sendiri tidak melihat ketiga buku tersebut sebagai sebuah serial atau trilogy, namun penulis berpendapat melihat ketiganya secara bersamaan dapat memberikan gambaran tentang dialektika antara pengamatan lapangan dan penguatan perspektif teoritis. Hal ini terutama bila melihat perbedaan buku pertama yang merupakan bunga rampai tulisan yang terpisah dan buku keduanya menekankan sejarah panjang politik global, serta kemungkinan potret konkret di kawasan di buku ketiga.

Ulasan ini mencoba melihat sisi populis tulisan Kaplan yang berangkat dari beragam essay dan kemudian dengan kategori semi-populer diterima di kalangan akademis dan pengambil kebijakan. Dari kalangan akademis, sejauh ini Kaplan dikritik karena kecenderungan determinisme dan penggunaan konsepsi geopolitik yang tidak lazim. Sementara itu harus diakui beberapa tulisan Kaplan pernah menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, termasuk juga preferensi Kaplan untuk mendukung invasi ke Irak yang kemudian diakuinya sebagai kesalahan.⁸

Review ini akan disusun selanjutnya dengan tiga bagian untuk melihat argumen yang dikemukakan di atas. Bagian pertama melihat pertalian ketiga buku ini secara lebih detil. Di sini penulis bukan hanya akan menyoroti ketiganya tetapi lebih ingin menyajikan benang merah dari ketiga buku yang terkesan terpisah ini. Pada bagian kedua, seperti yang diungkapkan di atas meskipun Kaplan umumnya menyajikan tulisannya berawal dari tulisan populer di majalah dengan audiens yang terbilang luas. Suatu hal yang berbeda dengan tulisan yang disampaikan pada jurnal yang memiliki khalayak pembaca yang lebih spesifik.⁹ Namun dapat dikatakan

⁸ http://www.robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_reflections.htm

⁹ yang menarik adalah sejumlah tulisan yang menjadi populer pada dekade pertama pasca Perang Dingin muncul pertama kali di media “semi populer” Tulisan Samuel Huntington pertama kali muncul di majalah *Foreign Policy* dan tulisan Francis Fukuyama “The End of History” muncul di majalah *The National Interest*. Lihat Samuel P. Huntington, “The Clash of

terdapat beberapa asumsi paradigmatik atau teoritikal serta tema yang berulang dari ketiga buku tersebut. Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan perihal paradigma realisme dan distopianisme yang membayangi pemikiran Kaplan. Setelah dua bagian tersebut, penulis akan menutup review ini dengan pilihan Kaplan dengan narasi traveloguenya sebagai sebuah metodologi.

Sebuah Benang Merah: Dunia Pasca-Perang Dingin dan Tantangan Unipolaritas Amerika

“The Coming of Anarchy” dipublikasikan sebagai sebuah artikel pertama kali pada Februari 1994 di majalah *The Atlantic*. Artikel sepanjang lebih dari 13 ribu kata tersebut bersama sembilan tulisan lain yang pernah dipublikasikan disejumlah media massa dibukukan bersama sebuah bab yang merupakan tulisan baru, “the Danger of Peace” sebagai penutup bunga rampai tersebut.¹⁰ Buku ini membawa pesan tentang prospek buruk yang diduga dapat terjadi di tengah semangat dan harapan yang dihembuskan oleh runtuhnya Tembok Berlin dan rezim komunis. Sarat dengan skeptisisme tentang globalisasi yang mendekatkan manusia di berbagai belahan dunia, kedekatan dan potensi perdamaian yang diusung humanisme liberal tersebut disanggah oleh Kaplan dalam rangkaian artikelnya.

Dalam buku pertama ini rentang waktu penerbitan memakan waktu paling tidak 6 tahun. Hampir kesemua tulisan di buku *The Coming of Anarchy* terbit pertama kali di majalah bulanan *The Atlantic*, kecuali tiga tulisan di antaranya. Susunan bunga rampai ini diawali oleh bab “The Coming of Anarchy” terbit pada Februari 1996¹¹, “Was Democracy Just A Moment?” terbit pada

Civilizations,” (*Foreign Affairs* 72 Summer 1992-1993): hlm. 22-49 dan Francis Fukuyama, “The End of History?,” (*The National Interest*, Summer 1989). Berbeda dengan kedua tulisan di atas, tulisan Robert D. Kaplan *The Coming of Anarchy* tidak berkembang menjadi buku utuh namun hanya dibukukan ulang dalam sebuah bunga rampai tulisannya

¹⁰ Robert D. Kaplan, *The Coming of Anarchy* (New York: Vintage Books. 2000)

¹¹ Robert D. Kaplan, “The Coming of Anarchy” (the *Athlantic*, 1994) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/02/the-coming-anarchy/304670/>

Desember 1997¹², “Idealism Won’t Stop Mass Murder” terbit pada 14 November 1997 di *The Wall Street Journal*,¹³ “Special Intelligence” terbit pada Februari 1998,¹⁴ “And Now for the News: Edward Gibbon’s *Decline and Fall*” terbit pada Maret 1997,¹⁵ “Proportionalism: A New Foreign Aid Strategy” terbit pada Agustus 1996,¹⁶ “Kissinger, Metternich, and Realism” terbit pada Juni 1999,¹⁷ “Conrad’s Nostromo and the Third World” terbit di *The National Interest* tahun 1998.¹⁸ Bunga rampai ini dipungkasi oleh “The Danger of Peace” yang secara khusus ditulis sebagai penutup bunga rampai ini.

Terbit dalam rentang waktu yang terpisah, dan juga melalui penerbitan yang beragam, sebagai sebuah buku bunga rampai, Kaplan ingin menyanggah semangat humanisme liberal yang beranggapan persoalan dunia akan lebih terkendali dan tidak lagi menantang. Sebaliknya ia merujuk pada asumsinya untuk melihat dari sisi yang berbeda dan lepas dari insting kerumunan (*herd instinct*) dengan merujuk pada fenomena buram yang berkembang pasca-Perang Dingin.

Lihat saja persoalan di negara-negara di pantai Barat Afrika yang terpuruk pada problem perang saudara. Diawali dengan kutipan dari salah seorang menteri di negara yang diamuk perang saudara, Kaplan melihat persoalan kemiskinan dan problem kelangkaan sumber

daya sebagai sumber konflik. Persoalan di negara seperti Sierra Leone merupakan mikrokosmos dari persoalan yang lebih luas terjadi di persoalan negara-negara pantai barat Afrika dan negara berkembang lainnya. Persoalan itu berurat-akar pada lemahnya pemerintah pusat dalam menjalankan administrasi, kebangkitan kepentingan daerah dan kesukuan, penyebaran pandemik yang tak tertanggulangi dengan baik, serta jumlah senjata bersenjata di dalam negeri.¹⁹

Kaplan melihat persoalan yang terjadi di negara-negara berkembang tersebut seperti yang dipreskripsikan dalam thesis Homer-Dixon yang bernafaskan neo-Malthusian dengan menegaskan sumber konflik pada kelangkaan sumber daya yang dapat menopang kebutuhan dasar hidup. Rezim pretorian yang menghisap sumber daya dan membawa kegagalan manajemen kemudian menjadi penyebab antara di antara kondisi anarchistic di dalam negeri tersebut dan persoalan manajemen sumber daya sebagai sebab. “*Democracy is problematic, scarcity is more certain*” demikian simpulan Kaplan dengan menyiratkan pada pemikiran Homer-Dixon.²⁰

Kaplan dalam preskripsinya kemudian beralih pada analogi yang dikemukakan oleh Homer-Dixon tentang sebuah limosin eksekutif yang berjalan di tengah daerah kumuh di tengah kota besar Amerika. Pada mulanya penumpang di dalam limosin tersebut dapat saja merasa aman dari kekacauan di luar kendaraannya. Namun seiring kekacauan berkembang di luar sana, kedamaian penumpang di dalam kendaraan mewah tersebut dapat saja terancam. Upaya untuk menanggulangi kekacauan di luar sana, (anarkhi yang melanda dunia) adalah tantangan keamanan dari pihak yang berada di dalam kendaranya (kelompok negara maju).²¹ Termasuk

¹² Kaplan (1997a)

¹³ Robert D. Kaplan “Idealism Won’t Stop Mass Murder” (*The Wall Street Journal*, 1997) diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB879455182938370500>

¹⁴ Robert D. Kaplan, “Special Intelligence” (*The Atlantic*, 1998) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/98feb/intel.htm>

¹⁵ Robert D. Kaplan, “And Now for the News The disturbing freshness of Gibbon’s *Decline and Fall*” (*The Atlantic* Maret 1997) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/97mar/decline/decline.htm>

¹⁶ Robert D. Kaplan, “Proportionalism” (*The Atlantic* Agustus 1996) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/96aug/proport/proport.htm>

¹⁷ Robert D. Kaplan, “Kissinger, Metternich, and Realism” (*The Atlantic* Juni 1999) ,<http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/99jun/9906kissinger.htm>

¹⁸ Robert D. Kaplan, “Conrad’s Nostromo and the Third World” (*The National Interest* Spring 1998) diakses dari <http://nationalinterest.org/bookreview/conrads-nostromo-and-the-third-world-681>

¹⁹ Kaplan (2000), hlm. 9

²⁰ Kaplan (2000), hlm. 21. Untuk rujukan teoritisnya Kaplan mengutip artikel dari Thomas Fraser Homer-Dixon, “On The Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict” *International Security*, Vol. 16, No. 2 (Fall 1991), pp. 76-116 diakses dari <http://www.homerdixon.com/projects/thresh/thresh1.htm>. Untuk versi lengkapnya dapat dilihat pada buku Thomas Fraser Homer-Dixon, *Environment, scarcity and violence*. (Princeton, NJ: Princeton University Press. 1999)

²¹ Kaplan (2000), hlm. 24. Secara utuh analogi tersebut digambarkan sebagai berikut, “Think of a stretch limo in the potholed streets of New York City, where homeless beggars live.

di dalamnya isu sensitive Afro-American yang memiliki kedekatan emosional dengan negara-negara Afrika.²²

Dunia yang terbelah (*bifurcated*) antara tipe kelompok manusia zaman mutakhir (*last man*) yang dicitrakan oleh Hegel dan Fukuyama yang menghuni dunia di negara-negara maju dengan kelompok lainnya yang merupakan tipikal manusia yang dicitrakan sebagai manusia zaman awal (*first man*) oleh Thomas Hobbes berada dibawa kuasa negara-negara berkembang. Berasal dari daerah yang terakhir inilah persoalan akan datang.²³

Hal senada masih disuarakan oleh Kaplan di tulisannya mengenai demokrasi yang menjadi bab selanjutnya. Di situ Kaplan berpendapat demokrasi membutuhkan prasyarat. Upaya kaum liberal humanis untuk mengeksport demokrasi ke negara-negara berkembang akan menemui kesulitan dengan tidak adanya prasyarat tersebut di negara-negara berkembang. Beberapa di antaranya yang cuplik oleh Kaplan adalah keberadaan kelompok kelas menengah yang pada kenyataannya dibentuk bukan oleh demokrasi namun justru sebagian besar oleh adanya authoritarianisme yang ditolerir oleh Amerika sebagai *champion democracy*. Kaplan berpendapat bukan persoalan demokrasi itu buruk atau baik, melainkan demokrasi itu sendiri lahir dari pencapaian sosial dan ekonomi.²⁴

Perdebatan mengenai masa depan demokrasi pasca-Perang Dingin, yang diperdebatkan oleh kelompok liberal dan neokonservatif tak lain merupakan pengulangan dari perdebatan antara pendapat filsuf Isiah Berlin yang mewakili kaum liberalist dengan pendapat filsuf Thomas Hobbes yang menjadi sandaran kaum realist. Perdebatan ini menurut Kaplan akan bermuara pada titik temu kedua pendapat tersebut. Bila titik

temu tersebut bergeser ke salah satu ideal secara ekstrim, kekacauan akan terjadi.²⁵

Hal ini juga yang terjadi dengan kemunculan kekuatan korporasi yang menjadi salah satu sentrum kekuatan tata kelola dunia. Kekuatan ini bukan hanya memiliki kekuatan ekonomi yang menyaingi negara, namun pengaruhnya juga menembus ke institusi pendidikan yang sebelumnya cukup didominasi oleh negara. Dengan keberadaan tersebut, euphoria kelanggengan demokrasi sebagai sebuah sistem paripurna menjadi tantangan. Ke depannya, perlu diprediksi sistem yang lebih berangkat dari manajemen kondisi real tersebut.²⁶

Perdebatan mengenai liberal versus realis sepertinya kembali muncul di sejumlah bab yang tersaji dalam buku ini. Kaplan menegaskan bahwa dalam kalkulasi politik internasional, moralisme yang diusung oleh liberalis sebagai sebuah ideal terkadang justru menimbulkan korban besar. Seperti yang terjadi dengan kegagalan mencegah penyebaran Nazi sebelum Perang Dunia II meletus saat Nazi Jerman menginvasi Chekoslovakia dan Polandia, serta invasi Serbia dalam konflik di bekas negara Yugoslavia.²⁷ Selain itu juga penggunaan pasukan khusus yang berkemampuan untuk mengumpulkan data intelijen menjadi bagian dari realisme militer yang akan menjadi masa depan politik internasional.²⁸ Dalam upayanya untuk meredam euphoria intervensionisme dengan dalih humanitarianisme, Kaplan sebagai seorang realist menyarankan proporsionalisme sebagai solusi. Berlandaskan pada tiga hal, proporsionalisme yang disarankan oleh Kaplan harus mempertimbangkan pada bantuan yang bertujuan mencegah perusakan stabilisasi di daerah yang berpotensi konflik domestik, peringatan dini akan potensi konflik, serta minimum intervensi.²⁹

Beberapa bab lain di bunga rampai ini berdasarkan pada review Kaplan atas sejumlah

Inside the limo are the air-conditioned post-industrial regions of North America, Europe, the merging Pacific Rim, and a few other isolated places, with their trade summity and computer information highways. Outside is the rest of mankind, going in a completely different direction.”

²² Kaplan (2000), hlm. 54

²³ Kaplan (2000), hlm. 24, 57

²⁴ Kaplan (2000), hlm. 70-71

²⁵ Kaplan (2000), hlm. 73.

²⁶ Kaplan (2000), hlm. 98

²⁷ Kaplan (2000), hlm. 103

²⁸ Kaplan (2000), hlm. 110

²⁹ Kaplan (2000), hlm. 120

buku, seperti buku Edward Gibbon yang berjudul *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, buku pertama karya Henry Kissinger yang berjudul *A World Restored: Matternich, Castle-reigh and the Problem of Peace 1812-1822* (1957), yang merupakan thesis doktoral mantan Menlu AS tersebut, dan novel Joseph Conrad yang berjudul *Nostromo: A Tale of the Seaboard* (1904). Yang menjadi fokus ulasan Kaplan dalam reviewnya adalah realisme, seperti yang digagas oleh realisme kajian hubungan internasional. Dalam ulasannya buku Gibbon, Kaplan menegaskan naik-turunnya peradaban roma ternyata bersandar pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kekuatannya dengan keinginannya untuk mengintervensi semua “persoalan” di pelosok bumi.³⁰ Kaplan juga mendukung distopianisme salah satu tipe karakter yang muncul dalam novel Conrad yang menjadi penengah antara despotik local dengan pihak idealis yang datang dari luar. Karakter ini adalah kelompok asing yang telah lama hidup di lingkungan lokal yang oleh karena itu idealismenya telah dapat menengahi realitas lokal dengan aspirasi yang dibawa oleh pihak yang terkesan naïf.³¹ Dalam ulasannya mengenai buku Kissinger, Kaplan mengetengahkan posisi politik mantan pejabat publik dan sarjana hubungan internasional tersebut. Kaplan melihat posisi Kissinger sebagai seorang realis terinspirasi dari tokoh Matternich, perdana menteri Austro-Hungaria yang mengedepankan prinsip realisme dalam upayanya menjaga stabilitas domestik dengan keseimbangan kekuatan di tingkat politik internasional. Hal itu tersirat dari beberapa keputusan yang diambil Kissinger saat menjabat sebagai menteri luar negeri yang selalu mengedepankan kredibilitas deterensi terhadap setiap pengambilan keputusannya. Tindakannya diambil bukan berdasarkan keinginan untuk menyenangkan pihak lawan (*appeasement*), namun untuk meningkatkan posisi tawar dan kredibilitas power terhadap pihal lawan. *Appeasement* hanyalah simbol kelemahan, sebagaimana pihak sekutur terpaksa membiarkan laku invasive Hitler sebelum menyebar dan pecah dalam perang global di paruh pertama

³⁰ Kaplan (2000), hlm. 116

³¹ Kaplan (2000), hlm. 168

abad ke-20. Keputusannya pun dilandasi oleh upaya untuk mencapai kepentingan nasional yang tidak terlalu peduli pada opini publik sebagaimana ketakutan akan intervensi di konflik Balkan.³² Itu lah penilaian Kaplan terhadap langkah Kissinger di Vietnam,³³ pembukaan hubungan diplomatik dengan Tiongkok,³⁴ dan pencapaian “perdamaian” pasca Perang Yom Kipur.³⁵ Sosok Kissinger dipuji oleh Kaplan sebagai sosok pengambil kebijakan yang berani melawan kecenderungan publik. Sosok yang berbeda dari pengambil keputusan di masa damai pasca-Perang Dingin, yang menurut Kaplan tidak akan berlangsung lama, karena sosok demikian hanya akan diukur dari keberhasilannya berhadapan dengan media massa saat konferensi press bukan dari ketangguhannya menghadapi suasana genting.³⁶

Pada buku *The Revenge of Geography* (2013), Kaplan menyajikan pandangan geopolitiknya secara lebih komprehensif. Buku setebal 414 halaman ini diawali dengan observasi lapangan melalui perjalanan Kaplan ke sejumlah kawasan yang menyiratkan akan adanya perubahan pasca-Perang Dingin.³⁷ Namun kembali Kaplan berkeyakinan persoalan geografi tidak serta merta menjadi mudah untuk diabaikan. Imaji akan adanya *Mitteleuropa* (Eropa Tengah) sebagai puncak perubahan geopolitik pasca Perang Dingin yang diawali jauh sebelum Tembok Berlin runtuh masih perlu dikaji lebih mendalam.³⁸ Dialektika yang dibangun oleh Kaplan adalah determinasi geography atas perkembangan teknologi sebagai capaian human agency masih harus diperdebatkan. Berkali-kali di dalam buku ini, Kaplan mengungkapkan persoalan teknologi tidak serta merta menihilkan batas-batas geografi yang telah lama menjadi batas bagi banyak aktor politik untuk menentukan kebijakan strategisnya.

³² Kaplan (2000), hlm. 140, 147

³³ Kaplan (2000), hlm. 145

³⁴ Kaplan (2000), hlm. 149

³⁵ Kaplan (2000), hlm. 151

³⁶ Kaplan (2000), hlm. 154

³⁷ Robert D. Kaplan (2013), “Chapter I: From Bosnia to Baghdad”

³⁸ Robert D. Kaplan (2013), hlm 6-9

Tanpa bermaksud menjadi fatalis, Kaplan melihat geografi meski mengalami perubahan karena adanya kemudahan teknologi tetap memainkan peranan krusial bagi pengambil keputusan.³⁹

Argument Kaplan yang dapat disarikan sebagai, “*those who forget geography can never defeat it*”⁴⁰ mengungkapkan bahwa kecanggihan teknologi dan globalisasi yang membawa kedekatan umat manusia di berbagai belahan dunia tidak serta menihilkan peranan geografi. Sebaliknya kedekatan tersebut membawa dampak “*shrinking space*” yang bila tidak dikelola dengan baik, menurut paradigm realis, akan menjadi sumber bencana.⁴¹ Berbeda dengan pandangan Thomas L. Friedman yang menilai globalisasi membawa dampak perseptif akan *flat world*, Kaplan menilai ada batasan yang tidak dapat terabaikan dari pengaruh geografi, sejarah dan budaya. Kaplan berupaya membantah pendapat yang beranggapan *geography no longer matters*.⁴² Di sisi lain, tanpa bermaksud menjadi fatalis, Kaplan juga menekankan dialektika antara peranan tokoh sejarah (*human agency*) dan faktor-faktor determinan tersebut.⁴³ Pada formulasi demikian Kaplan menilai tokoh sejarah adalah seseorang yang berhasil mengelola kepentingan negaranya dalam mengatasi tantangan-tantangant tersebut. Hal ini yang menjadi sebuah paparan utama dalam buku keduanya.

Buku ini merupakan sebuah jawaban atas perkembangan politik internasional setelah dua dasawarsa berakhirnya Perang Dingin. Kaplan bertujuan untuk melihat peta sebagai bagian penting pengambilan keputusan agar tidak terbebani oleh kekuatan yang ada dalam bentang geografi. Hal tersebut pada akhirnya bukan saja berdampak pada isolasionisme karena pikiran

sempit, tetapi juga penggelaran sumber daya yang berlebihan yang memunculkan reaksi balik dalam bentuk isolasionisme. Seperti yang dikemukakan Kaplan dalam kutipan berikut,

“It is my contention that in embracing realism in the midst of the Iraq War, however uneasily we did so—and for however short a time we did so—what we actually embraced without being aware of it was geography, if not in the overt, imperialistic Prussian sense of the word, then in the less harsh Victorian and Edwardian senses. It is the revenge of geography that marked the culmination of the second cycle in the Post Cold War era, to follow the defeat of geography through air power and the triumph of humanitarian interventionism that marked the end of the first cycle. We were thus brought back to the lowering basics of human existence, where, rather than the steady improvement of the world that we had earlier envisioned, what we accepted was the next struggle for survival, and by association, the severe restraints with which geography burdened us in places such as Mesopotamia and Afghanistan.”⁴⁴

Berangkat dari pemahaman realisme hubungan internasional, Kaplan melihat meskipun perkembangan teknologi sepertinya mendukung misi humanisme liberal, yang salah satunya menjadi landasan invasi ke Irak, justru semangat demikianlah yang membuat Amerika Serikat terbebani dengan persoalan yang lokasinya jauh dan membutuhkan konsentrasi yang tidak kecil. Terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu mengatasi geografi, Kaplan beranggapan, “geografi mungkin telah dilupakan namun bukan berarti geografi telah tertaklukan”.⁴⁵ Hal ini kembali mengulang penegasan Kaplan akan posisi teoritisnya yang mendukung realis dalam perdebatan dengan pandangan kaum liberal internasionalis. Kaplan juga secara khusus mengutip Morgenthau sebagai pijakan pemahamannya akan pemikiran realis.⁴⁶

Buku yang berangkat dari sebuah artikel yang terbit di *Foreign Policy* pada tahun 2009,⁴⁷

³⁹ Robert D. Kaplan, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (2013), (New York: Random House Trade Paperbacks), hlm. [xx]

⁴⁰ Anne-Marie Slaughter, “Power Shifts ‘The Revenge of Geography,’ by Robert D. Kaplan” *The New York Times* 15 Oktober 2012 diakses dari http://www.nytimes.com/2012/10/07/books/review/the-revenge-of-geography-by-robert-d-kaplan.html?_r=0

⁴¹ Robert D. Kaplan (2013), hlm. 117

⁴² Robert D. Kaplan (2013), hlm. xix, 23-24.

⁴³ Slaughter (2012), *loc cit*

⁴⁴ Robert D. Kaplan, (2013), hlm. 29.

⁴⁵ Robert D. Kaplan (2013), hlm. 33

⁴⁶ Robert D. Kaplan (2013), hlm. 26, 27, 34

⁴⁷ Robert D. Kaplan, “The Revenge of Geography” *Foreign Policy* May/June 2009 diakses dari <http://www.colorado.edu/>

kemudian mengajak pembaca membuka kembali pemikiran klasik dari sarjana-sarjana yang berkecimpung dengan geopolitik dan geografi. Buku ini terbagi dalam tiga bagian besar dengan bagian pertama mengupas sejumlah pemikir besar dalam khasanah kajian geografi dan geopolitik, bagian kedua mengupas sejarah dan potensi masa depan dari enam wilayah penting dan negara potensial di dalamnya (Rusia, Tiongkok, India, Iran, Turki, dan Eropa), serta bagian akhir yang terdiri dari bab khusus mengenai Amerika Serikat yang berbatasan dengan Meksiko. Pada bagian pertama, Kaplan secara panjang menguraikan pemikiran geopolitik mulai dari Herodotus hingga ke *heartland*, dari pre-Mino hingga ke pasca-Mackinder. Pada bagian kedua buku ini, pembaca diajak untuk berdialog dengan pemikiran geopolitik yang telah menjadi klasik. Harus diakui kemampuan prosaik Kaplan dalam merangkum sejumlah nama besar pemikir geopolitik dan sejarah, seperti Marshal G. S. Hodgson yang terkenal dengan *Venture of Islam* dan William H. McNeill dengan bukunya *The Rise of the West: A History of the Human Community*. Kupasan kedua pemikir sejarah tersebut diletakan oleh Kaplan sebagai sebuah realisme sejarah umat manusia, sebagaimana Morgenthau meletakkan realisme politik internasionala.⁴⁸

Paparan teoritis ini dipungkasi oleh ulasan Kaplan atas pemikiran Paul Bracken, seorang professor Yale University, yang tertuang dalam buku *Fire in the East: The Rise of Asian Military Power and the Second Nuclear Age* (1999). Thesis utama dari pemikiran Bracken adalah adanya krisis ruang akibat dari perkembangan jumlah manusia dan teknologi. Dampak dari perkembangan tersebut adalah adanya fenomena “the shrinking Eurasian chessboard” yang salah satu diantaranya ditandai dengan tergabungnya kekuatan ekonomi dan militer di dalam satu negara Asia, yaitu Tiongkok. Fenomena tersebut bertambah keruh dengan adanya factor “disruptive technology” yang dapat memicu krisis karena mengganggu keamanan struktur

geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf

⁴⁸ Kaplan (2013), hlm. 36

power politik global.⁴⁹ Manajemen krisis yang demikian menurut Kaplan perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam menimbang persoalan geopolitik dunia.

Buku ini ditutup dengan satu bab khusus yang menegaskan keunikan hubungan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Dengan adanya batas darat yang demikian besar dan kesenjangan ekonomi, persoalan kedua negara membutuhkan tindakan yang cepat. Hal ini menjadi salah satu tekanan Kaplan bagi pengambil kebijakan di Amerika Serikat. Penggelaran sumber daya yang berlebihan (*overstretched*) yang membuat Amerika Serikat memberikan perhatian besar ke belahan bumi yang jauh, sementara persoalan perbatasan dengan negara tetangganya terabaikan.⁵⁰

Pemikiran Braudel digunakan Kaplan sebagai ilustrasi bagaimana Laut Mediterania yang menjadi pembatas antara Eropa dengan Afrika Utara menjadi sarana penghubung pekerja migran yang membanjiri Eropa. Demikian Kaplan menganalogikan perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko.⁵¹ Analogi tersebut bukan saja mengingatkan kembali thesis *bifurcated world* yang diusung Kaplan di dalam *The Coming of Anarchy* tetapi posisi politiknya tentang *limited intervension* ada di dalam bunga rampai tersebut. Tentang intervensi yang harus dilandaskan pada kepentingan nasional dari pada semangat missionari humanisme liberal, Kaplan sependapat dengan sejumlah pemikir realis seperti Stephen M. Walt, John Mearsheimer dan Samuel P. Huntington.⁵² Kaplan mengutip pemikiran Samuel P. Huntington dalam buku *Who are We: the Challenges to America's National Identity* (2004) yang menganggap imigrasi dari Meksiko sebagai sebetulnya *reconquista* wilayah-wilayah yang dulu direbut Amerika Serikat dari Meksiko pada tahun 1930an hingga 1940an.⁵³ Sementara untuk kedua pemikir realis yang pertama, Kaplan mengutip pendapat mereka tentang pembebanan

⁴⁹ Kaplan (2013), hlm. 117

⁵⁰ Kaplan (2013), Chapter XV: Braudel, Mexico and Grand Strategy

⁵¹ Kaplan (2013), 322

⁵² Kaplan (2013), 325

⁵³ Kaplan (2013), 337

AS dengan pengeluaran sumber daya yang berlebihan. Kaplan bersepakat bahwa invasi AS ke Irak tak lepas dari pengaruh kepentingan pertimbangan politik kawasan yang mendukung kepentingan Israel. Sementara AS sendiri tidak terlalu berkepentingan dengan invasi dan penggulingan rezim Saddam Husein. Bahkan invasi ke Afganistan dan stabilisasi kawasan Asia Tengah hanya akan menguntungkan Tiongkok yang mampu membangun fasilitas infrastruktur tanpa harus berjibaku secara militer terlebih dahulu.⁵⁴

Pada buku *Asia's Cauldron*, dengan menimbang sejarah negara-negara pesisir Laut Tiongkok Selatan, Kaplan kembali menempatkan geografi dan sejarah sebagai faktor penting dalam melihat perkembangan dinamika kawasan maritim yang memegang peranan penting bukan saja bagi negara-negara di kawasan tersebut melainkan juga karena posisinya menyangkut kepentingan perdagangan dunia. Berangkat dari upayanya melihat kawasan ini jauh sebelum negara pasca-kolonial berdiri, yaitu periode sejarah kerajaan-kerajaan tradisional yang menunjukkan pengaruh politik yang berbeda dari kondisi modern. Kaplan merujuk pada kebudayaan Champa di Vietnam di mana ditemukan pengaruh kuat kebudayaan Hindu India tepat di sebelah wilayah yang kuat dengan kebudayaan Tiongkok. Bayangan sejarah demikian menunjukkan batasan kebudayaan dan sejarah masa lalu nampak berbeda dari masa modern yang harus lebih banyak disibak sebelum menilik pada perkembangan modern. Selain itu kondisi geografis yang di dominasi oleh perairan membuat kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan tersendiri. Kawasan ini menurut Kaplan tepat disebut sebagai sebuah Mediterania-nya Asia dengan potensi pertumbuhan dan konflik yang besar.⁵⁵ "Europe is a landscape; East Asia a seascape" demikian Kaplan memulai bab pertama seraya menegaskan karakteristik geografis yang membedakan Asia

Timur dengan Eropa yang menjadi kampung halaman pemikir geopolitik dunia.⁵⁶

Kaplan melihat di kawasan Asia Timur, posisi Laut Tiongkok Selatan bukan saja sentral bagi negara-negara pesisir seperti Vietnam, Malaysia, Philipina, Taiwan, dan juga Tiongkok. Persoalan geopolitik di kawasan ini juga dapat disederhanakan oleh Kaplan dengan kaitannya kebangkitan Tiongkok dan kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan. Kebangkitan Tiongkok membutuhkan Laut Tiongkok Selatan seperti dahulu pernah Amerika Serikat lakukan terhadap Laut Karibia di abad ke-19. Ini adalah persoalan sentral dari kawasan ini.⁵⁷ Untuk itu, jawaban Kaplan adalah keberadaan pertimbangan kekuatan antara kebangkitan Tiongkok dan keberadaan Amerika Serikat sebagai pengimbang kekuatan, bukan dominasi seperti beberapa pendapat pemikir realis.⁵⁸

Pembahasan buku ini berlanjut pada pertimbangan kekuatan di antara negara-negara pesisir Laut Tiongkok Selatan. Beberapa poin penting yang terungkap dalam paparan Kaplan adalah peningkatan anggaran belanja militer dan dinamika pertimbangan kekuatan tak lepas dari kebangkitan ekonomi kawasan. Hal yang penting untuk dibedakan antara Laut Karibia dengan Laut Tiongkok Selatan adalah yang terakhir berperan penting bagi jalur pelayaran maritime global. Posisi demikian menjadikannya bukan saja penting bagi negara-negara pesisir di kawasan ini, melainkan juga kepentingan global yang melintasi. Posisi penting itu juga akan sangat berdampak kepada Tiongkok yang secara ekonomi menunjukkan kebangkitan yang membutuhkan Laut Tiongkok Selatan sebagai "pintu gerbang" maritimnya.⁵⁹

Persoalan pertimbangan kekuatan di kawasan ini dilihat oleh Kaplan melalui prisma masing-masing negara di kawasan. Berangkat dari sejarah dan *nation building* dari tiap negara, persoalan Laut Tiongkok Selatan dan pertimbangan kekuatan menjadi persoalan penting bagi negara-negara tersebut. Namun dapat dilihat perbedaan

⁵⁴ Kaplan (2013), 326

⁵⁵ Robert D. Kaplan, *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific* (New York: Random House, 2014), hlm. 50

⁵⁶ Kaplan (2014), hlm. 5

⁵⁷ Kaplan (2014), hlm. 19, 45

⁵⁸ Kaplan (2014), hlm. 30

⁵⁹ Kaplan (2014), Chapter II China's Caribbean

yang ada dari tiap negara dalam konteks kekuatan material dan *nation building*. Tak luput dari perhatian adalah pandangan negara-negara tentang kebangkitan Tiongkok dan peranan Amerika Serikat sebagai pengimbang di kawasan. Kaplan mengemukakan posisi negara-negara yang secara relatif lebih kecil dibandingkan Tiongkok berupaya untuk menghindari ter-Finlandia-kan (*Finlandized*). Hal ini terutama mengingatkan agar pihak pengimbang kekuatan tidak terlambat melakukan tindakan krusial sebelum perimbangan kekuatan di kawasan tidak memberikan pilihan lain kepada negara-negara di kawasan selain mengikuti kekuatan baru yang sedang bangkit. Analogi tersebut lebih tepat digunakan dalam melihat pilihan politik Vietnam yang berbatasan langsung dengan Tiongkok dan juga mempunyai antagonisme sejarah yang cukup panjang.⁶⁰

Pendekatan atomistik dalam melihat perimbangan kekuatan ini ditutup dengan paparan perjalanan Kaplan yang batal melihat markas kapal selam Malaysia di Serawak. Negara bagian yang relative tertinggal dengan catatan pra-kolonial yang masih membekas sebagai wilayah Kesultanan Sulu yang jatuh ke tangan Inggris. Di sini Kaplan seolah menjadi sangat intuitif dengan keluar dari kerangka perimbangan kekuatan realis dengan melihat potensi kelemahan domestik sebagai salah satu faktor destabilisasi kawasan.⁶¹

Neotradisionalisme dan Distopianisme: Posisi Teoritis Robert D. Kaplan

Pada sejumlah review, pengulas buku Robert D. Kaplan menyebutnya sebagai “self-proclaimed geopoliticians” selain juga mengimbuhnya dengan jurnalis dan traveler. Nuansa travelogue kental dalam setiap tulisan Kaplan yang memang banyak muncul di media populer sebelum dibukukan. Ketiga buku yang diulas dibuku ini jelas menunjukkan demikian. Posisi jurnalis yang menulis dengan gaya reportase perjalanan memang terlihat menjadi posisi “epistemologis” Kaplan. Tak dapat dipungkiri, gaya tutur prosaik Kaplan cukup dapat diterima di kalangan luas.

⁶⁰ Kaplan (2014), Chapter III The Fate of Vietnam, hlm. 70

⁶¹ Kaplan (2014), 119

Bukan saja Presiden Clinton memperhatikan uraiannya yang mengutip analogi limosine di tengah kawasan kumuh dari Homer-Dixon saat memberikan ceramah tentang pembangunan berkelanjutan di depan National Academy of Science,⁶² hingga artikel di *The Atlantic* itu disebarluaskan ke semua perwakilan AS di Afrika,⁶³ hingga juga artikelnnya tentang kebencian antar etnis mencegah Presiden Clinton untuk segera mengirimkan pasukan darat saat harus mengintervensi konflik di Bosnia serta dibaca luas di kalangan pekerja bantuan internasional, staff PBB serta prajurit yang bertugas di Bosnia.⁶⁴ Meski hal terakhir ini menjadi ironi, karena Kaplan berada dalam posisi politik mendukung intervensi segera yang berbeda hasilnya dengan pemahaman pembaca seperti Presiden Clinton.⁶⁵

Kaplan memang mengakui kecenderungannya pada observasi lapangan sebagai keutamaan dibandingkan pengamat belakang meja. Ungkapan ini Nampak dari pengantar yang diulang di setiap bukunya, tentang perjalanannya menembus Eropa Timur di saat kebanyakan jurnalis memilih Amerika Latin atau Lebanon, serta petualangan di dalamnya. Ia juga menulis obituary tentang Patrick Leigh Fermor seorang travelogue yang cukup berjasa membantu Inggris dalam PD II. Tokoh ini menurut Kaplan mirip dengan karakter T.H. Lawrence yang terkenal dalam kisah Lawrence of Arabia yang mendukung kebijakan Inggris untuk menggembosi Turki di Semenanjung Arabia dan sekitarnya. Namun, Fermor menurut Kaplan dalam obituary yang berjudul “The Humanist in the Foxhole” menggambarkan sosok tersebut sebagai, “*combined the traits of a*

⁶² Gearóid Ó Tuathail, *Critical Geopolitics The Politics of Writing Global Space* (London: Routledge. 1996), hlm. 199

⁶³ Catherine Besteman, “Why I Disagree with Robert Kaplan” dalam Catherine Besteman dan Hugh Gusterson, *Why America's Top Pundits Are Wrong: Anthropologists Talk Back* (Berkeley: University of California Press. 2005), hlm. 87

⁶⁴ Tone Bringa, “Haunted by the Imaginations of the Past” dalam Catherine Besteman dan Hugh Gusterson, *Why America's Top Pundits Are Wrong: Anthropologists Talk Back* (Berkeley: University of California Press. 2005), hlm. 61

⁶⁵ Robert D. Kaplan, “Career Reflections” diakses dari http://www.robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_reflections.htm. Robert D. Kaplan, “Reading too Much into Book” (*The New York Times* 13 Juni 1999), diakses dari <http://www.nytimes.com/1999/06/13/opinion/reading-too-much-into-a-book.html>

soldier, linguist and humanist, and he appreciated history and culture for their own sake even as he used that wisdom to defend civilization.” Selanjutnya Kaplan mengungkapkan bagaimana pendekatan Fermor sangat berguna dalam kondisi saat ini, *“in today’s world of overly specialized foreign-policy knowledge, in which military men, politicians and academics inhabit disconnected intellectual universes, we need more generalists like Fermor”*.⁶⁶

Kaplan menambahkan sisi humanis Fermor yang berbeda dengan pengambil kebijakan yang terjebak dalam kepentingan nasional. Seperti yang dituliskan Kaplan, *“Unlike the young Winston Churchill in Sudan or the Prussian general Helmuth von Moltke journeying through the Ottoman Empire, Fermor and his friends refused to reduce the world to questions of strategy and national interest: they were more taken by culture and landscape, which in fact made them more valuable than most intelligence agents.”* Romantisasi Fermor masih terus berlanjut dengan pujian meskipun Fermor turut berjasa dalam membantu Inggris mengalahkan Jerman di Pulau Kreta dikarenakan kemampuannya akan bahasa lokal dan kedekatannya dengan pejuang setempat, tokoh yang ditulis Kaplan ini menolak berkarir di Departemen Perang Inggris dan memilih meneruskan petualangannya. Dari kisah perjalanannya itu, Fermor kembali ke Yunani pada tahun 1950an yang menghasilkan dua buku perjalanan yang diakui kedalamannya oleh ahli kawasan, *Mani: Travels in the Southern Peloponnese* (1958) dan *Roumeli: Travels in Northern Greece* (1966).⁶⁷

Meskipun demikian, apakah pendekatan observasi lapangannya telah memberikan gambaran yang utuh? Nampaknya observasi lapangan yang dilakukan oleh Kaplan masih jauh memuaskan dan menimbulkan bias stereotype. Jurnalisme perjalanan yang dilakukannya masih

belum menulik pada lokalitas permasalahan dan pemahaman yang berimbang tentang kawasan yang dikunjunginya.

Demikian bila kita merujuk keberatan yang dikemukakan oleh dua antropolog terhadap dua buku Kaplan yang cukup laris, *Balkan Ghost* dan *The Coming Anarchy*. Tone Bringa menilai pandangan Kaplan dalam *Balkan Ghost* terlalu menyederhanakan sejarah sehingga malah menguatkan mitor kebencian etnis yang dihembuskan pemimpin nasionalis masing-masing kelompok saat konflik pecah di bekas Yugoslavia.⁶⁸ Sebagai seorang antropolog yang melakukan penelitian lapangan dengan tinggal di Bosnia sebelum hingga pecahnya konflik. Bringa menegaskan Kaplan dalam perjalanannya yang merujuk pada buku Rebecca West *Black Lamb and Grey Falcon* saat memulai perjalanan di Balkan pada akhir dasawarsa 1980an,⁶⁹ pada akhirnya gagal melihat kekayaan dan keragaman lapis-lapis kehidupan sosial dan belajar dari saling bermuka-mukaan antara identitas politik individual dan ekspresi kolektif yang berkembang di Balkan.⁷⁰

Kaplan yang seolah memiliki otoritas sebagai ahli kawasan Balkan, justru dalam uraiannya sangat kurang menyajikan sisi harmonis yang pernah berkembang di kawasan itu. Seperti sedikitnya kutipan dan uraian mengenai Bosnia dan mekanisme konflik resolusi yang berkembang di masyarakat setempat telah ada sebelum konflik pecah. Di sini justru kutipan Kaplan secara selektif lebih banyak mengungkapkan persoalan yang meski tidak salah secara historis namun tidak lengkap menggambarkan kondisi masyarakat setempat.⁷¹ Pada akhirnya reportase perjalanan Kaplan malah mengumbar stereotype dan klise yang meneguhkan Balkan sebagai kawasan yang dipenuhi oleh kelompok yang gemar kekerasan yang didorong oleh *“irrational, superstitious hatred”*.⁷²

⁶⁶ Robert D. Kaplan, “The Humanist in the Foxhole” (*The New York Times* 14 Juni 2011) diakses dari http://www.nytimes.com/2011/06/15/opinion/15Kaplan.html?_r=0

⁶⁷ Kaplan (2011), *loc cit*. Untuk perbandingan obituari lain dan kisah hidup Patrick Leigh Fermor yang lebih detil silakan lihat James Campbell, “Sir Patrick Leigh Fermor obituary: Highly regarded travel writer and heroic wartime SOE officer” (*The Guardian*, 10 Juni 2011) diakses dari <https://www.theguardian.com/theguardian/2011/jun/10/patrick-leigh-fermor-obituary>

⁶⁸ Bringa (2005), hlm. 63.

⁶⁹ Bringa (2005), hlm. 78.

⁷⁰ Bringa (2005), hlm. 66.

⁷¹ Bringa (2005), hlm. 70-73

⁷² Bringa (2005), hlm. 81

Kaplan juga dikritik dalam penggambarannya tentang Afrika dalam *The Coming of Anarchy* yang dianggap bias dalam menggambarkan karakter masyarakat setempat. Persoalan negara gagal yang diangkatnya mengabaikan preskripsi neoliberal yang dijalankan oleh sejumlah negara di kawasan pantai Barat Afrika sebelum konflik internal merebak. Program *structural adjustment* yang dijalankan berdasarkan saran dari lembaga-lembaga keuangan global secara tidak langsung mempengaruhi posisi negara vis-à-vis terhadap kekuatan pasar dan sentralitasnya dalam persoalan sosial yang lebih luas.⁷³

Argumennya yang mengusung ide kelangkaan sebagai sumber dari konflik dari Homer-Dixon (1991) pun tidak cukup mengupas dalam bingkai yang lebih luas bahwa terdapat pendapat yang berbeda dalam menilai sebab konflik. Konflik sumber daya di Afrika seperti yang diungkapkan oleh Kaplan dalam artikelnya, dalam perspektif teoritis bukan cuma dipandang sebagai akibat dari kelangkaan. Jika saja mau sedikit mengeksplorasi khazanah teori yang menyoroti persoalan konflik internal bahkan di sudut lain terdapat teori yang melihat konflik tersebut terjadi karena adanya kelebihan sumber daya (*abundance of resource*) yang memunculkan motif ekonomi bagi aktor-aktor yang terlibat. Bahkan perspektif yang salah satunya diusung oleh kajian Paul Collier dan Anke Hoeffler (1998) ini menjadi pijakan untuk saran kebijakan meregulasi pasar berlian dunia untuk mengintervensi permintaan berlian yang menjadi salah satu pemicu konflik di kawasan kaya mineral di negara-negara dikunjungi Kaplan di *The Coming Anarchy*.⁷⁴ Untuk kajian yang lebih fokus pada perdebatan teoritis Phillipe Le Billon (2001) menyebutkan perdebatan teoritis masih terus berlanjut dengan titik tekan yang berbeda dari masing-masing perspektif.⁷⁵

⁷³ Lihat Richard Joseph, "Democratization in Africa after 1989: Comparative and Theoretical Perspectives" dalam Lisa Anderson (ed.), *Transition to Democracy*, (New York: Columbia University Press, 1999), hlm. 244-245. Bonny Ibhawoh, "Structural Adjustment, Authoritarianism and Human Rights in Africa" *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, Vol. XIX No. 1 (1999), hlm. 160

⁷⁴ Paul Collier dan Anke Hoeffler, "On Economic Causes of Civil War." *Oxford Economic Papers* 50(4) . 1998.

⁷⁵ Philippe Le Billon. "The Political Ecology of War: Natural

Selain juga persoalan perdebatan teoritis tersebut menurut Andrea Edoardo Varisco (2009) bahwa persoalan resolusi konflik di kawasan tersebut harus diutamakan pada penanganan interelasi antara situasi ekonomi, sosial, dan politik daripada persoalan manajemen sumber daya.⁷⁶

Kompleksitas ini lah yang abai dipaparkan dalam "The Coming of Anarchy" yang hanya mencuplik Homer-Dixon dan penggambaran realitas sosial dan ekonomi yang lebih utuh yang membuat argument *bifurcated world* yang dianalogikan dalam limo yang berjalan di daerah kumuh menjadi bias ethnosentris negara maju. Keberadaan program liberalisasi di Afrika dan permintaan pasar berlian yang di dominasi negara maju malah menutup mata bahwa daerah kumuh itu juga disebabkan oleh kebijakan penumpang limosine mewah tersebut, atau negara-negara maju.

Selain itu Kaplan secara teoritis menyebut dirinya sebagai realis. Hal ini terlihat dari sejumlah kutipan sarjana hubungan internasional yang bermazhab tersebut. Kaplan menulis tentang Kissinger yang tidak menutupi kekagumannya kepada sosok mantan pejabat publik dan masih berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Kaplan mengakui politik kepala dingin yang dilakukan Kissinger tidak bisa memuaskan banyak orang, namun keputusan dan modus analisisnya tetap bertahan hingga kini. "*Henry Kissinger's classical realism—as expressed in both his books and his statecraft—is emotionally unsatisfying but analytically timeless*" demikian Kaplan menulis di *The Atlantic* dalam sebuah artikel "In Defense of Henry Kissinger".⁷⁷

Di beberapa bagian bukunya, seperti di *Asia's Cauldron* (2014) dan *The Revenge of Geography* (2013), Kaplan menyuplik pemikiran

Resources and Armed Conflicts." *Political Geography* 20 (5) 2001.

⁷⁶ Andrea Edoardo Varisco, "A Study on the Inter-Relation between Armed Conflict and Natural Resources and its Implications for Conflict Resolution and Peacebuilding" *Journal of Peace, Conflict and Development - Issue 14, July 2009*

⁷⁷ Robert D. Kaplan "In Defense of Henry Kissinger" (*The Atlantic* Mei 2013) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/05/the-statesman/309283/>

Mearsheimer, seperti konsepnya tentang “stopping power of water” yang berasal dari buku *The Tragedy of Great Power Politics* (2001). Kaplan melihat sisi humanistik dari professor hubungan internasional yang bersedia sebagai akademisi di University of Chicago dan tetap berpegang teguh dalam paradigam *offensive realism* yang diusungnya. Pandangan yang dingin dan menjauh dari upaya “idealistik” dalam melihat kemungkinan kerjasama internasional yang lahir dari kelompok liberal institutionalist.⁷⁸ Pandangan dingin Mearsheimer tersebut justru memiliki tantangan analitik dengan melihat kebangkitan Tiongkok belakangan ini. Offensive realism yang diusung oleh Mearsheimer memprediksi setiap negara berambisi menjadi hegemon, terutama negara yang bangkit semacam Tiongkok. Oleh karenanya pandangan dingin itu justru menarik buat Kaplan.⁷⁹

Pemikiran yang dicuplik Kaplan dan dijadikan sandaran dalam paparannya adalah kelompok pemikir yang dalam kategori yang dikemukakan oleh John A. Vasques sebagai generasi pertama realis (Hans J. Morgenthau, George F. Kennan, dan Henry Kissinger) yang disebutnya sebagai realis tradisional dan generasi ketiga realis yang disebut sebagai generasi neotradisional realis (John Mearsheimer dan Stephen M. Walt di antaranya). Kelompok pemikir ini dicirikan dengan penggunaan sejarah, studi kasus, dan berkurangnya kecenderungan analisa quantitative.⁸⁰ Hal ini tak mengherankan dalam genre semi-populer yang bernuansa travelog ala Robert D. Kaplan, paradigma ini mendukung ulasannya.

Namun yang patut diingat adalah Kaplan dalam uraiannya tidak cukup mengulas konsep pokok dan kritik terhadap sejumlah pemikir yang dia cuplik. Sehingga layak dipertanyakan apakah Kaplan benar seorang realis yang berdiri atas ulasannya berdasarkan paradigmatis atau

ia hanya sekedar mengutip paparan pemikir realis sebelum sempat mengutarakan posisinya sendiri dalam dunia yang realis. Penekanannya pada konsepsi-konsepsi seperti agresi, konflik, perebutan sumber daya alam, potensi ancaman nasional dan stabilitas internasional memang mendekatkan Kaplan pada diskusi-diskusi pemikir realis mulai dari Hobbes sampai Mearsheimer yang terkini. Namun yang luput dari perhatian Kaplan adalah perdebatan di dalam kelompok realis sendiri tidak serta merta potret buram itu menghasilkan gambaran yang monolitik. Seperti preskripsi offensive realism dari Mearsheimer bahwa kebangkitan Tiongkok akan mengklaim posisi hegemonik yang mengancam posisi Amerika Serikat,⁸¹ di sisi lain *defensive realism* berpendapat lain karena berasumsi strategi defensif akan menjadi prioritas bagi pihak yang membutuhkan stabilitas daripada upaya mengubah *status quo* yang berisiko dalam kondisi *security dilemma* yang dihasilkan struktur politik internasional.⁸² Kedua cabang pemikiran realis ini pun berangkat dari pemikiran neorealis Kenneth Waltz (1979) namun berbeda dalam melihat faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku negara.⁸³ Dalam hal ini, Robert D. Kaplan gagal menangkap pesan dari pemikir realis seperti Stephen M. Walt dalam “International Relations: One World Many Theories” (1998) yang mengatakan pengambil kebijakan sekalipun perlu memperhatikan abstraksi dunia teori, karena sesungguhnya preskripsi tiap paradigmatis memiliki penekanan yang berbeda yang menghasilkan narasi berbeda tentang politik internasional.⁸⁴

Seperti juga pemikiran geopolitik yang dikutipnya, Kaplan dengan kemampuan meringkas yang handal dan elaboratif cukup

⁷⁸ John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions,” *International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter 1994/1995)

⁷⁹ Robert D. Kaplan, “Why John J. Mearsheimer Is Right (About Some Things)” *The Atlantic January/February 2012* diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/01/why-john-j-mearsheimer-is-right-about-some-things/308839/>

⁸⁰ John A. Vasquez, *The Power of Power Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press. 2004) hlm. 2

⁸¹ John J. Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia,” *The Chinese Journal of International Politics*, Vol. 3, No. 4 (Winter 2010).

⁸² Lihat Part II dari Shiping Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time Defensive Realism*, (New York: Palgrave Macmillan. 2010)

⁸³ Peter Rudloff, “Offensive Realism, Defensive Realism, and the Role of Constraints,” *The Midsouth Political Science Review*, Volume 14 (December 2013), hlm. 46

⁸⁴ Stephen M. Walt, “International Relations: One World, Many Theories”, *Foreign Policy*, No. 110, Special Edition: *Frontiers of Knowledge*. (Spring, 1998).

berhasil merangkum sejumlah pemikir geopolitik klasik. Namun sekali lagi, ia tidak cukup menempatkan perdebatan atau menghadirkan kontestasi pemikiran sebelum menguatkan alasannya untuk bersandar di salah satu posisi politik. Uraian Kaplan sebagai *travel journalist* memang cukup menarik yang membuatnya akan unggul dibandingkan ahli geografi belakang meja, namun kupasan teoritisnya yang kurang menyinggung pemikiran geopolitik mutakhir menempatkan ulasan di bagian kedua buku *The Revenge of Geography* (2013) menjadi membosankan⁸⁵ dan bahkan bahkan mengabaikan aspek geopolitik lingkungan yang muncul dalam tulisannya di *The Coming of Anarchy* (2000). Tulisan Kaplan yang didaku sebagai sebuah upaya mengangkat pentingnya geografi justru disambut skeptis oleh penstudi geografi itu sendiri, karena kerja pengkaji geografi sendiri akan membutuhkan upaya yang besar untuk menghasilkan buku sedemikian. Namun upaya Kaplan untuk menuliskan pentingnya geografi bagi pembaca awam dapat diartikan sebagai pengakuan dari seorang penulis berpengaruh sekelas Kaplan bahwa geografi itu penting.⁸⁶

Hal ini berbeda ketika Kaplan menguraikan keamanan kawasan Asia Timur yang tertuang di buku *Asia's Cauldron*. Penyederhanaan dengan prosa perjalanannya tidak berhasil menukik pada persoalan yang jauh lebih kompleks. Setelah menguraikan persoalan keamanan dan ekonomi yang ada di Laut Tiongkok Selatan yang dianggapnya sebagai jantung permasalahan dan berpotensi memunculkan konflik kawasan yang dapat merembet menjadi konflik global. Termasuk di antaranya terancamnya negara-negara di kawasan Asia Timur terfinlandiakan karena hanya memiliki independensi nominal sementara dalam praktik kesehariannya terpaksa mengikuti keinginan Beijing.⁸⁷

Kaplan cukup jeli melihat kompleksitas kepentingan ekonomi dan perimbangan kekuatan di kawasan serta juga kepentingan pihak luar, baik itu Amerika Serikat yang berupaya

mengamankan sekutu tradisional di kawasan serta juga kepentingan negara maritim lainnya. Namun ketika Kaplan di beberapa bab sesudahnya justru lebih memilih menguraikan persoalan domestik dan *nation building* di negara-negara yang terlibat klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan serta Singapura, beberapa pertanyaan muncul. Bukan saja mengapa Kaplan memilih factor domestik sebagai bagian persoalan? Sementara sebelumnya ia mengutip *the stopping power of water* yang mengesankan dia sedang menarasikan neotradisionalisme dengan pendekatan struktural ala Mearheimer.

Pun ketika ia memilih melihat sejarah dan factor domestik seperti mungkin realisme generasi awal melihat hal-hal tersebut, ia tidak cukup memberikan pembaca alasan mengapa memasukan sejumlah negara dan mengabaikan negara lainnya. Hingga ketika ia meliha kebangkitan Tiongkok dan posisi Amerika Serikat *offshore balancer* kembali pembaca mungkin hanya melihat hal itu sebagai semata kalkulasi pribadi daripada sebuah pertimbangan teoritis lebih lagi paradigmatik.

Hal yang patut diperhatikan dari uraiannya mengenai faktor domestik dan nation building adalah factor pemerintah yang kuat atau lemah serta posisi nasionalisme yang menjadi penyangga kohesifitas negara-negara yang diamatinya. Bukan saja negara-negara kecil di kawasan ini berhadapan dengan identitas nasionalisme mereka, Tiongkok yang memiliki sejarah panjang juga berhadapan dengan persoalan yang sama. Terlebih bila pemerintahan di Beijing harus menarasikan penyelesaian sengketa klaim wilayah kepada khalayak domestiknya yang masih sarat dengan semangat nasionalisme. Hingga akhirnya Kaplan menutup uraiannya dengan mengambil posisi Serawak yang lebih tertinggal dengan kawasan lain di Malaysia dan relatif termiliterkan karena adanya penempatan pasukan demi mengantisipasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, Kaplan seolah berintuisi persoalan Laut Tiongkok Selatan bukan saja persoalan di tingkat internasional, tapi dalam derajat tertentu ia juga kelanjutan dari problem domestik dari banyak negara-negara yang terlibat sengketa klaim. Intuisi ini yang menjadi ciri khas Kaplan, karena ia tidak mesti patuh pada disiplin

⁸⁵ Harm de Blij, "Geographical Reviews" *The Geographical Review* 103 (2): 304–314, April 2013, hlm. 304

⁸⁶ de Blij (2013) hlm. 305

⁸⁷ Kaplan (2016), hlm. 26

keilmuan sebagaimana umumnya akademisi, karena posisi Kaplan adalah musafir yang melaporkan untuk khalayak di dalam negerinya.

Penutup: Narasi Petualang dan Pilihan Metodologi

Kaplan selalu memulai narasi di tiap bukunya dengan gaya reportase yang menyiratkan kedalaman pengetahuannya soal lokalitas kawasan. Namun persoalan kedalaman itu kembali dipersoalkan oleh akademisi yang memilih jalur spesialisasi. Antropolog mengkritisi reportase “mendalamnya” yang bias dan tidak cukup merefleksikan keutuhan lokalitas yang dibangun Kaplan. Pengkaji geografi menjadi gusar karena sedemikian ambisiusnya upaya Kaplan mengingatkan pentingnya geografi tetapi abai terhadap pemikiran mutakhir kajian itu sehingga pilihan teoritis dan kupasannya tentang kawasan dan negara potensial mejadi membosankan. Lagi-lagi teks geopolitik bukan melulu sebuah teks akademik, uraian Kaplan bukanlah sebuah narasi yang netral secara politik. Kaplan berbicara kepada audiens yang luas sekaligus spesifik, yaitu masyarakat pembaca majalah semi-populer di Amerika Serikat.

Pada tulisan ini, buku-buku Kaplan diakui sebagai sebuah buku dengan narasi yang cukup mengalir. Dystopia yang banyak dikritik merupakan bagian dari kemampuannya memberikan pembaca dari sudut pandanganya. Tak hanya satu dua Kaplan bernarasi demikian, hingga sejarawan Paul Kennedy menyebut narasinya sebagai *doomsterism*.⁸⁸ Itu menjadi gaya Kaplan.

Namun yang menjadi soal adalah, apakah narasi kengerian yang fasih dituturkan Kaplan itu cukup proporsional menggambarkan situasi di lapangan meskipun ia mengaku turun ke lapangan langsung untuk menuliskan hal itu. Namun bantahan dari antropolog seperti Tone Bringa tentang narasinya yang timpang dan pembelaan Kaplan bahwa khalayak pembacanya salah menangkap apa yang ia tuliskan dengan dalih, “*travel books are narratives, not policy guides.*”

⁸⁸ Paul Kennedy, “Doomsterism”, *The New York Review of Books* 19 September 1996 diakses dari <http://www.nybooks.com/articles/1996/09/19/doomsterism/>

Sementara itu ia masih terus mendaku sebagai “realis” adalah sebuah esensialisme kosong yang melampaui perbedaan profesi jurnalisme atau akademisi. Seperti Tone Bringa tuliskan tentang pembeda pemahamannya dengan suguhan Kaplan bukan terletak antara sudut pandang antropolog atau wartawan, tetapi terletak pada jurnalisme yang berkualitas dan buruk, seperti juga ada antropologi yang berkualitas dan buruk. Yang membedakan jurnalisme yang berkualitas dan antropologi yang berkualitas adalah “upaya untuk membongkar prasangka dan stereotype dan menyajikan keragaman makna, kekayaan pola interaksi sosial baik itu kisah yang ada di dalam negerinya atau bahkan tempat yang jauh seperti Balkan.”⁸⁹

Kutipannya yang menyandarkan pada sejumlah dalil akademik seperti pemikiran realisme yang dingin dan thesis kelangkaan Homer-Dixon tidak serta merta menjadikan suguhan prosa Kaplan menjadi teks akademik. Karena sekali lagi, penggiringannya pada satu sisi kelompok pemikiran tanpa menyadari adanya keragaman dalam ranah teoritis seolah menutupi pembaca akan kompleksitas realitas. Hal ini yang perlu dibedakan menjadi realis dalam arti sinis, serta menyuguhkan realism dalam kacamata akademik sekalipun.

Kaplan hadir dengan upaya untuk membongkar kejumudan berpikir akademik yang sempit dan terkotak-kotak dengan menyuguhkan laporan pandangan. Alih-alih laporan pandangannya menjadi lebih kaya, ia menjadi jauh lebih menyederhanakan daripada akademisi belakang meja. Hal ini malah membuatnya jauh dari insiniasi dirinya akan tokoh-tokoh petualang dan generalis yang dikaguminya. Itu pilihan metodologinya namun sepertinya masih jauh dari tuntas bila ia terus menyederhanakan persoalan dalam narasi yang timpang.

Referensi

- Anderson (ed.), Lisa. 1999. *Transition to Democracy*. New York: Columbia University Press.
- Anne-Marie Slaughter, “Power Shifts‘The Revenge of Geography,’ by Robert D. Kaplan” *The New York Times* 15 Oktober 2012 diakses dari <http://>

⁸⁹ Bringa (2005) hlm. 83

- www.nytimes.com/2012/10/07/books/review/the-revenge-of-geography-by-robert-d-kaplan.html?_r=0
- Besteman, Catherine. 2005. "Why I Disagree with Robert Kaplan" dalam Catherine Besteman dan Hugh Gusterson, *Why America's Top Pundits Are Wrong: Anthropologists Talk Back* (Berkeley: University of California Press. 2005)
- Bringa, Tone. 2005. "Haunted by the Imaginations of the Past" dalam Catherine Besteman dan Hugh Gusterson, *Why America's Top Pundits Are Wrong: Anthropologists Talk Back* (Berkeley: University of California Press. 2005)
- Campbell, James. 2011. "Sir Patrick Leigh Fermor obituary: Highly regarded travel writer and heroic wartime SOE officer" (*The Guardian*, 10 Juni 2011) diakses dari <https://www.theguardian.com/theguardian/2011/jun/10/patrick-leigh-fermor-obituary>
- Collier, Paul dan Anke Hoeffler. 1998. "On Economic Causes of Civil War." *Oxford Economic Papers* 50(4). 1998.
- de Blij, Harm. 2013. "Geographical Reviews" *The Geographical Review* 103 (2): 304–314, April 2013.
- Fukuyama, Francis. 1989. "The End of History?," (*The National Interest*, Summer 1989).
- Homer-Dixon, Thomas Fraser. 1991, "On The Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict" *International Security*, Vol. 16, No. 2 (Fall 1991) diakses dari <http://www.homerdixon.com/projects/thresh/thresh1.htm>.
- Homer-Dixon, Thomas Fraser. 1999. *Environment, scarcity and violence*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- http://www.robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_bio.htm
- http://www.robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_reflections.htm
- Huntington, Samuel P. 1993. "The Clash of Civilizations," (*Foreign Affairs* 72 Summer 1992-1993)
- Ibhawoh, Bonny. 1999. "Structural Adjustment, Authoritarianism and Human Rights in Africa" *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, Vol. XIX No. 1 (1999)
- Joseph, Richard. 1999. "Democratization in Africa after 1989: Comparative and Theoretical Perspectives" dalam Lisa Anderson (ed.), *Transition to Democracy*, (New York: Columbia University Press. 1999)
- Kaplan, Robert D. "Career Reflections" diakses dari http://www.robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_reflections.htm.
- Kaplan, Robert D. 1986. "Sudan: A Microcosm of Africa's Ills" (*The Atlantic* April 1986) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1986/04/sudan-a-microcosm-of-africas-ills/304699/>.
- Kaplan, Robert D. 1989. *The Balkans: Europe's Third World* (*The Atlantic* Juli 1989) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/flashbks/balkans/kaplanf.htm>
- Kaplan, Robert D. 1993. "Syria: Identity Crisis" (*The Atlantic* Februari 1993) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1993/02/syria-identity-crisis/303860/>
- Kaplan, Robert D. 1994. "The Coming of Anarchy" (*The Atlantic*, Februari 1994) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/02/the-coming-anarchy/304670/>
- Kaplan, Robert D. 1996. "Proportionalism" (*The Atlantic* Agustus 1996) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/96aug/proport/proport.htm>
- Kaplan, Robert D. 1997. "Was Democracy just A Moment?" (*The Atlantic* Desember 1997) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/12/was-democracy-just-a-moment/306022/>.
- Kaplan, Robert D. 1997b. "Idealism Won't Stop Mass Murder" (*The Wall Street Journal*, 1997) diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB879455182938370500>
- Kaplan, Robert D. 1998. "And Now for the News The disturbing freshness of Gibbon's *Decline and Fall*" (*The Atlantic* Maret 1997) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/97mar/decline/decline.htm>
- Kaplan, Robert D. 1998. "Conrad's Nostromo and the Third World" (*The National Interest* Spring 1998) diakses dari <http://nationalinterest.org/bookreview/conrads-nostromo-and-the-third-world-681> Kaplan (2000)
- Kaplan, Robert D. 1998. "Special Intelligence" (*The Atlantic*, 1998) diakses dari <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/98feb/intel.htm>
- Kaplan, Robert D. 1999. "Kissinger, Metternich, and Realism" (*The Atlantic* Juni 1999) diakses <http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/99jun/9906kissinger.htm>
- Kaplan, Robert D. 1999. "Reading too Much into Book" (*The New York Times* 13 Juni 1999), diakses dari <http://www.nytimes.com/1999/06/13/opinion/reading-too-much-into-a-book.html>

- Kaplan, Robert D. 2000. *The Coming Anarchy*. New York: Vintage Book
- Kaplan, Robert D. 2009. "The Revenge of Geography" *Foreign Policy* May/June 2009 diakses dari http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf
- Kaplan, Robert D. 2011. "The Humanist in the Foxhole" (*The New York Times* 14 Juni 2011) diakses dari http://www.nytimes.com/2011/06/15/opinion/15Kaplan.html?_r=0
- Kaplan, Robert D. 2012. "Why John J. Mearsheimer Is Right (About Some Things)" *The Atlantic* January/February 2012 diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/01/why-john-j-mearsheimer-is-right-about-some-things/308839/>
- Kaplan, Robert D. 2013. "In Defense of Henry Kissinger" (*The Atlantic* Mei 2013) diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/05/the-statesman/309283/>
- Kaplan, Robert D. 2014. *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific*. New York: Random House.
- Kennedy, Paul. 1996. "Doomsterism", *The New York Review of Books* 19 September 1996 diakses dari <http://www.nybooks.com/articles/1996/09/19/doomsterism/>
- Le Billon, Philippe. 2001. "The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts." *Political Geography* 20 (5) 2001.
- Mearsheimer, John J. 1995. "The False Promise of International Institutions," *International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter 1994/1995)
- Mearsheimer, John J. 2010. "The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia," *The Chinese Journal of International Politics*, Vol. 3, No. 4 (Winter 2010).
- Robert D. Kaplan, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (2013), (New York: Random House Trade Paperbacks), hlm. [xx]
- Rudloff, Peter. 2013. "Offensive Realism, Defensive Realism, and the Role of Constraints", *The Midsouth Political Science Review*, Volume 14 (December 2013)
- Tang, Shiping. 2010. *A Theory of Security Strategy for Our Time Defensive Realism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Tuathail, Gearóid Ó. 1996. *Critical Geopolitics The Politics of Writing Global Space*. London: Routledge.
- Varisco, Andrea Edoardo. 2009. "A Study on the Inter-Relation between Armed Conflict and Natural Resources and its Implications for Conflict Resolution and Peacebuilding" *Journal of Peace, Conflict and Development - Issue 14, July 2009*
- Vasquez, John A. 2004. *The Power of Power Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walt, Stephen M. 1998. "International Relations: One World, Many Theories", *Foreign Policy*, No. 110, Special Edition: *Frontiers of Knowledge*. (Spring, 1998).

TENTANG PENULIS

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana di Department of Politics, University of Sheffield dengan Program Studi MSc in Politics with Research Method. Pernah bekerja di beberapa lembaga penelitian, serta melakukan beberapa aktivitas *freelance*. Selain menempuh studi pascasarjana, juga menulis kolom untuk beberapa media. Minat Kajiannya terletak pada keterkaitan antara Gerakan Sosial dan Politik Internasional, dengan isu spesifik pada Islam Politik, Masyarakat Sipil, Regionalisme, dan Politik Identitas. Aktif sebagai Ketua Divisi Kajian Lingkaran Studi Cendekia dan Wakil Ketua PCI Muhammadiyah Inggris Raya 2015-2017. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: armumar1@sheffield.ac.uk

Arwin Datumaya Wahyudi Sumari

Penulis saat ini aktif sebagai analis Kebijakan Rencana Kontijensi Ekonomi dalam Kedeputian Politik dan Strategi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Gelar Doktorat diperoleh dari Institute Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro dan Informasi. Penulis juga pernah bergabung sebagai peneliti di Intelligent System Research Group (ISRG) dan Signal and System Laboratory (SSL) ITB. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: arwin.sumari@dkn.go.id atau arwin.sumari@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar S2 diperoleh dari Asia and International Studies di Griffith University, Brisbane, Australia. Ia menekuni kajian utama tentang perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga melakukan kajian perbatasan antara Thailand dengan negara-negara tetangganya,

serta mengkaji pendekatan konsep *connectivity* maupun *interconnectivity* di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: irewatiawani@yahoo.co.id.

David Putra Setyawan

Penulis adalah pemerhati masalah diplomasi pertahanan nasional dan aktif sebagai Deputi Informasi dan Komunikasi dalam Lingkaran Studi Strategis. Gelar Magister diperoleh dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Diplomasi Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fa.davidsetyawan@gmail.com

Diandra Mengko Megaputri

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 Hubungan Internasional diselesaikan di Universitas Katolik Parahyangan, sementara pendidikan S2 pada bidang ilmu Manajemen Pertahanan diselesaikan di Universitas Pertahanan Indonesia. Pernah aktif sebagai peneliti pada Indonesia Center for Diplomacy, Democracy, and Defense pada tahun 2012-2013. Minat kajiannya adalah isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan, Security Sector Reform (SSR), dan Industri Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: diandramengko@yahoo.com

Fathimah Fildzah Izzati

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi *Indoprogress*, dan penulis buku *Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang*. Pendidikan S1 di bidang Ilmu Politik di tempuh di Universitas Indonesia. Penulis menekuni studi-studi yang berkaitan dengan isu ekonomi politik, buruh, perempuan dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: fildzah.izzati@gmail.com

Ikrar Nusa Bhakti

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP-UI dan gelar Ph.D di bidang Sejarah dan Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia. Beberapa kontribusi tulisannya antara lain termuat dalam buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung), The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), serta di jurnal-jurnal ilmiah maupun surat kabar lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: ikrar.lipi@gmail.com

Khanisa Krisman

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sementara pendidikan S2 jurusan Hubungan Internasional ditempuh di College of Asia and The Pacific, Australian National University. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan Information and Communications Technology (ICT), isu-isu cyber dan sosial media dalam Hubungan Internasional, serta isu-isu terkait regionalisme di Asia Tenggara dan ASEAN. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: khanisa_krisman@yahoo.com.

Nanto Sriyanto

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar S1 Hubungan Internasional diperoleh dari Universitas Padjajaran. Sementara pendidikan S2 ditempuh di The University of Queensland, Australia, School of Political Science and International Studies. Ia menekuni studi-studi terkait perkembangan keamanan internasional dan kawasan, politik luar negeri Indonesia serta kajian teori hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: nantosriyanto@gmail.com

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Hubungan Internasional untuk S1 dan Resolusi Konflik untuk S2. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sandy.raharjo@gmail.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

